

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Saputro (2010) tentang "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007". Penelitian ini akan menjelaskan karakteristik kemiskinan di 15 provinsi; mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kemiskinan di tingkat makro; dan hubungan antara masing-masing faktor utama dalam P1. Berdasarkan analisis faktor diperoleh ada tiga faktor utama yang mencirikan 15 provinsi miskin, yang kerja, pendidikan, dan tempat tinggal. Analisis regresi logistik menunjukkan hubungan antara faktor pekerjaan dan pendidikan dengan P1 negatif. Kedua pekerjaan dan pendidikan faktor memiliki dampak yang signifikan pada P1. Sementara itu, faktor tempat tinggal berhubungan positif dengan P1, tetapi efeknya tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan Sulistiawati (2012) tentang "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". Studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial di provinsi di Indonesia. Masa studi lima tahun yaitu 2006-2010 dengan menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Biro Pusat Statistik dalam bentuk kombinasi antara data *time series* (2006-2010) dan data *cross section* (33 provinsi di Indonesia) juga dikenal sebagai panel Data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan Analisis Model Jalur. Uji 2 (dua) hipotesis dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, upah minimum memiliki efek negatif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Efek upah minimum terhadap lapangan kerja memiliki koefisien jalur $-0,39$ dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar $0,000$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja tenaga kerja produktivitas rendah yang biasanya menyerap di sektor primer, sektor yang menyerap tenaga kerja paling. Kedua, penyerapan tenaga kerja memiliki positif, tetapi tidak pengaruh yang berarti terhadap kesejahteraan sosial. Pengaruh penyerapan tenaga kerja pada kesejahteraan sosial memiliki koefisien jalur $0,08$ dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig.) dari $0,332$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi di Indonesia karena: 1). Upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan dasar minimum, upah 2) minimum yang diterima oleh tenaga kerja lebih rendah dari tingkat pendapatan pajak.

Penelitian yang dilakukan Yacoub (2012) tentang "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". Penelitian ini melihat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menguji 6 (enam) hipotesis dari masa studi dari 6 (enam) tahun 2005-2010 menggunakan data panel dalam bentuk data *time series* (2005-2010) dan penampang (12 kabupaten/kota) di Provinsi Kalimantan Barat. Analisis model regresi ini melalui SPSS. Hasil

pengujian dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai t $0,002 < 0,05$ membentuk hubungan yang berlawanan (negatif), yang dalam teori harusnya menjadi arah (positif).

Penelitian yang dilakukan Putri dan Ni Nyoman (2013) tentang " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2007-2011. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non perilaku. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1
Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Saputro (2010)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007	Pendidikan, Pekerjaan Tempat Tinggal, dan Kemiskinan	Analisis Faktor dan Analisis Regresi Logistik	Faktor utama yang mencirikan 15 provinsi miskin yaitu, yang kerja, pendidikan, dan tempat tinggal. Ada hubungan negatif dan signifikan antara faktor pekerjaan dan pendidikan dengan P1.
Sulistiawati (2012)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	Upah minimum penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial	Analisis Regresi Model Jalur	Peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi di Indonesia
Yacoub (2012)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Pengangguran dan Kemiskinan	Analisis Regresi Model Data Panel	Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,
Putri dan Ni Nyoman (2013)	Beberapa Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan	Regresi linear berganda.	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Leasiwal (2013)	Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku	Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup serta Jumlah Sekolah Menengah Atas terhadap Kemiskinan	Regresi Linier Berganda	Variabel yang berpengaruh signifikan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku: Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah,

				Angka Melek huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup, dan Jumlah SMA
Amalia (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Kota Samarinda	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	<i>Path Analysis Model</i>	Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Samarinda
Saleh (2002)	Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia	Tingkat Pendapatan per Kapita, Pengeluaran Pemerintah, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Bersekolah, IPM Indeks Partisipasi Wanita, Rasio Gini, Rasio Populasi Rumah Tangga, <i>Dummy Variable Time</i> terhadap Tingkat Kemiskinan	Regresi Linier Model <i>Pooling Time Series</i>	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan propinsi di Indonesia adalah IPM, investasi fisik Pemda,, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih, dan krisis ekonomi

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan

dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (*income*) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu (BPS, 2004). Upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut.

Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya dalam berbagai bidang (kemiskinan plural). Menurut Max-Neef *et. al*, sekurang-kurangnya ada beberapa macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal, kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak kepemilikan tanah, kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya atas kesadaran hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan, kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas, kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi, dan

kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, dan tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan di atas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan yang lain diatasi dengan pemenuhan kebutuhan strategis. Selain 6 macam kemiskinan di atas, ada 2 macam kemiskinan antara lain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif :

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Jadi, tingkat kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labor Organization (1976) sebagai berikut: “Kebutuhan dasar meliputi dua unsur, pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan,

dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural”.

2. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Arsyad, 2004 : 239).

2.2.2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi

konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004:123).

2.2.3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih beradadi bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar

rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rendahnya pemahaman agama, rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas, dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan

Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Osca Lewis (1993), misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dsb.

Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Konsep kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan

sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Dalam bahasanya Lewis (1978), perekonomian membutuhkan kode etik, sehingga tidak ada yang dirugikan sesama hamba Tuhan, yang juga sama-sama memiliki hak memanfaatkan dan memakmurkan alam semesta. Etika ekonomi tidak hanya mengatur hubungan kerja mekanis, untung rugi antar manusia dengan manusia dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi. Namun lebih dari itu, kode etik menyangkut hak dan kewajiban manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.

Aktivitas ekonomi inilah yang pada akhirnya melahirkan nilai-nilai spiritualitas Ketuhanan, harmonisasi alam dan manusia. Kemiskinan bukan merupakan takdir Tuhan, akan tetapi merupakan efek keserakahan penguasa, pemilik modal dan para kapitalis sesat, sehingga agama wajib ikut memberikan perlawanan terhadapnya. Spirit agama untuk mewujudkan keadilan ekonomi, menjamin dari rasa aman dan kelaparan harus tetap direbut dari para penghalangnya. Jihad dalam agama bukan saja membela kesucian Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya Maha Suci (*Al Quds*), membela keagungan Tuhan, tetapi Tuhan adalah Maha Agung (*Al adhim*). Namun, jihad yang sejati juga melawan sistem yang memiskinkan diri kita, memiskinkan rakyat, agama dan negara.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di

masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin, maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

1. Hubungan Pertumbuhan PDRB dengan Kemiskinan

Menurut Boediono (1985:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakekat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999: 141).

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985: 275). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi

makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDRB yang berarti juga penambahan Pendapatan Daerah (PD) (Tambunan, 2001: 2-3). Dalam pengertian lain pertumbuhan PDRB adalah suatu proses peningkatan kapasitas produksi dari suatu perekonomian secara komprehensif dan terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu, sehingga menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro, 2000: 371).

Kuznets (1955:121) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan histories di Negara-negara maju mengemukakan pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik (Todaro, 2000:207). Arsyad (1999: 147-148) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi diberberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Pertumbuhan PDRB bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan dan atau sisi penawaran. Titik perpotongan antara kurva penawaran dengan kurva penawaran adalah titik keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) yang menghasilkan suatu jumlah output agregat (PDRB) tertentu dengan tingkat umum tertentu. Output agregat yang dihasilkan di dalam suatu ekonomi (atau negara) selanjutnya membentuk PN. Apabila pada periode awal ($t = 0$) output

adalah Y_0 , maka yang dimaksud dengan pertumbuhan PDRB adalah apabila pada periode berikutnya output = Y_1 (di mana $Y_1 > Y_0$).

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu PDRB per kapita, di mana PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Besarnya rata-rata kemampuan pendapatan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengakses sejumlah fasilitas kesehatan termasuk dalam mencukupi kebutuhan akan kesejahteraan. Kemampuan untuk mengakses kesejahteraan ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Apabila PDRB per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat akan meningkat yang selanjutnya akan berpengaruh meningkatkan kemampuan untuk kebutuhan akan kesejahteraan. Jika kebutuhan akan kesejahteraan ini semakin dapat dicukupi, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Begitupun sebaliknya, berdasarkan mekanisme tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dengan Kemiskinan

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator sosial di bidang pendidikan yang mencerminkan lama bersekolah masyarakat yang ada di suatu daerah. Besarnya angka rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Apabila kualitas rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini

dikarenakan peningkatan kesejahteraan akan mendorong produktivitas atau meningkatkan aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan. Meningkatnya taraf kesejahteraan ini akan berpengaruh mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan mekanisme tersebut, maka rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh

pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002:88).

3. Hubungan Jumlah Pengangguran dengan Kemiskinan

Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

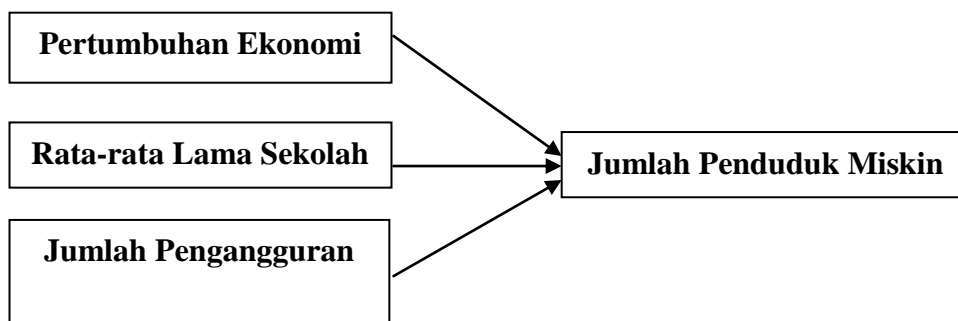
Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen (1995:79) menyatakan bahwa “kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai

pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*)". Menurut Chambers dalam Nanga (2006:132), "kemiskinan terutama di daerah pedesaan (*rural poverty*) adalah masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*), keterisolasian (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan kelemahan fisik (*physical weakness*), di mana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Namun demikian, kemiskinan merupakan faktor penentu yang memiliki pengaruh paling kuat dari pada yang lainnya".

Apabila tingkat pengangguran masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan kesejahteraan akan mendorong produktivitas atau meningkatkan aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan. Meningkatnya taraf kesejahteraan ini akan berpengaruh mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan mekanisme tersebut, maka rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin regional seperti yang telah diterangkan di atas merupakan aspek struktural yang menjelaskan bagaimana terbentuknya kemiskinan di suatu daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat di susun hipotesis sebagai berikut :

- a. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- b. Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- c. Diduga jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.